

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1960 an timbul fenomena baru, lanjutan dari gerakan sosial lama, yaitu Gerakan Sosial Baru (New Social Movements atau NSM). Gerakan sosial baru ini berkembang menjadi sangat dinamis terutama dengan timbulnya pergolakan di negara-negara Eropa Timur yang ingin melepaskan diri dari otoritarianisme menuju demokrasi. Berbeda dengan gerakan sosial lama, anggotanya terdiri atas generasi pasca-materialis (post-materialist). Dinamakan pasca-materialis dalam arti bahwa kemajuan industri sudah berhasil memenuhi kebutuhan materiil manusia untuk hidup secara layak. Sehingga mempunyai cukup waktu dan dana untuk memfokuskan diri pada masalah diluar kepentingan materiil dari masing-masing golongan. Dan tujuannya berubah antara lain meningkatkan kualitas hidup. Caranya ialah dengan mendirikan berbagai kelompok yang peduli pada masalah-masalah baru seperti hak asasi manusia, gerakan anti nuklir, lingkungan dan gerakan perempuan. Dan diantara kelompok kepentingan tersebut ada yang bersifat sosial seperti menyediakan air bersih, dan ada yang bersifat advokasi. Dasar dari kelompok ini adalah protes. Mereka sangat kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat tinggi, sehingga merasa terasingkan dari masyarakat. Mereka menginginkan desentralisasi dari kekuasaan negara, desentraliasasi pemerintah, partisipasi dalam peningkatan swadaya masyarakat, terutama masyarakat lokal. Orientasi mereka mirip dengan ideologi Kiri Baru (New Left). Kelompok-kelompok ini terus-menerus berinteraksi dengan badan eksekutif,

dengan tetap memerhatikan kedudukan otonomnya terhadap negara (maka sering dinamakan Non-Governmental Organizations atau NGO). Juga dibina interaksi dengan unsur-unsur kemasyarakatan lainnya termasuk dunia ekonomi dan industri. Cara kerja mereka sebanyak mungkin tanpa tekanan atau paksaan, tetapi melalui lobbying serta networking yang intensif tetapi persuasif. Tetapi jika caranya ini kurang berhasil, mereka tidak segan-segan bertindak lebih keras dengan mengadakan tindakan langsung seperti demonstrasi besar-besaran, pendudukan dan pemogokan, yang kadang-kadang bisa berakhir dengan kekerasan.¹

LSM adalah salah satu bagian yang memiliki peranan didalam struktur kemasyarakatan, dimana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka akan mengganggu jalannya struktur secara keseluruhan. Sehingga LSM sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya. Harus mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Maka dengan berjalannya fungsi dari LSM yakni dalam hal ini perberdayaan dalam masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk LSM, telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memobilisasi anggapan umum tentang isu-isu penting tentang perempuan, dengan tujuan akhir memberdayakan perempuan. Kemunculan berbagai LSM yang memobilisasikan isu-isu perempuan menunjukkan bahwa besarnya perhatian dari masyarakat. Di Indonesia kelahiran dari beberapa masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat atau yang populer di sebut LSM pada tahun 1970-an dilihat dari krisis yang terjadi pada Negara Indonesia, kemiskinan, kerusakan lingkungan, pelarian politik, kekerasan oleh Negara, pada

¹ Miriam Budiarto, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", PT. Gramedia Pustaka: Jakarta, 2008, Hal. 384

dasaranya tidak berbeda dengan kelahiran LSM internasional.²

Berakhirnya pemerintahan orde baru membawa atmosfer baru bagi kehidupan berorganisasi di Indonesia. LSM juga organisasi non pemerintahan, sebagai salah satu bentuk organisasi telah leluasa muncul dan berkembang demikian pesat. Baik ditinjau dari organisasi maupun dari segi program kegiatan. Kehadiran LSM semakin diperlukan sebagai bagian dari masyarakat. Pandangan atau aspirasinya serta program yang dilaksanakannya, membuat lembaga masyarakat ini tampil sebagai salah satu organisasi yang menyuarakan hati nurani masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah menagih rasa tanggung jawab para penyelenggara Negara dalam mengambil dan menjalankan keputusan. Sehingga tidak ada lagi kesewenangan dalam mengambil dan menjalankan keputusan. Pada awal tahun 1990-an LSM Indonesia mengalami puncak perkembangannya, jumlah LSM seluruh Indonesia 13.500. Jaringan internasional berfungsi dengan optimal. Pada saat bersamaan jurnalis muda Indonesia yang awalnya adalah aktivis kampus atau aktivis LSM, bangkit, berkembang biak dengan cepat, dan mulai serta bahu membahu dengan seluruh aktivis LSM. Gabungan kekuatan ini mengantarkan LSM pada puncak kegiatannya sebagai kelompok penekan dominasi Negara, serta dominasi kekuatan kapitalisme ekonomi.³ Akan tetapi puncak kejayaan LSM ini tidak berusia lama, baik karna digero~~goti~~ faktor internal, Indonesia memasuki masa reformasi setelah kejatuhan rezim otoriter militeristik Soeharto pada tahun 1997. Dengan kondisi sebagai Negara yang bangkrut secara ekonomi, diserbu globalisasi, serta mengalami sebagai kerentanan di bidang social budaya.⁴

² Ichsan Malik, 2004, Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan, Jakarta: Buku Kompas. Hlm.6

³ Ibid, hlm.8

⁴ Ibid, hlm.9

Perkembangan tersebut diperkuat lagi ketika pada 1980-an berkembang kesadaran bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting untuk pembangunan dan perombakan sosial ekonomi secara damai. Dalam sosial, dan ekonomi yang sudah mapan saat itu upaya membangun masyarakat dengan skala kecil-kecil sebagaimana yang dilakukan LSM periode sebelumnya tidaklah banyak berarti. Dari perkembangan kesadaran tersebut selanjutnya muncul LSM jenis baru lagi yang lebih berorientasi dan bertujuan untuk membuat perubahan struktural.

Diterbitkannya UU No. 8 Tahun 1985 pada pertengahan 1980-an memperlihatkan kehendak dari rezim Orde Baru untuk memperkuat kontrolnya terhadap organisasi kemasyarakatan, termasuk LSM. Sebagai akibatnya banyak ormas atau asosiasi bekerja di bawah kontrol negara. Dharma Wanita (organisasi para istri pegawai negeri) atau yayasan PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) merupakan contoh ormas yang bekerja di bawah kontrol pemerintah. Akibat pengaturan itu LSM dan organisasi-organisasi civil society yang lain tidak mendapat tempat leluasa. Kemampuan masyarakat dalam mempengaruhi dan meminta pertanggung jawaban pemerintah menjadi sangat terbatas.

Keadaan mulai menjadi lebih kondusif bagi LSM dan keormasan pada masa setelah jatuhnya Presiden Soeharto atau yang lebih dikenal dengan masa Reformasi. LSM dan organisasi-organisasi sejenis bermunculan, dan harapan bahwa pranata-pranata sosial (civil society) akan berkembang lagi mulai muncul. Seperti di negara-negara maju, LSM ada yang aktif di bidang sosial (Pendidikan dan Kesehatan) ada yang lebih menitikberatkan pada advokasi dan penekanan pada pemerintah.

Dengan mendasarkan pada analisa Hope dan Timel (1999) yang kemudian dilengkapi dengan pemikiran Eldridge dan Kothari serta analisis ideologi-ideologi utama dunia oleh Baradat, Roem Topatimasang, seorang Aktivist LSM senior di Indonesia mengemukakan bahwa dilihat dari sudut orientasi, LSM di Indonesia dapat dibagi dalam 5 kelompok paradigma, yaitu paradigma kesejahteraan, paradigma modernisasi, paradigma reformasi, paradigma pembebasan, dan paradigma transformasi.⁵

LSM penganut paradigma pertama yaitu kesejahteraan melihat bahwa sebab-sebab kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat adalah kekuatan yang berada di luar kendali manusia, seperti nasib atau takdir dan bencana alam. Dengan dasar pemikiran ini, tujuan LSM penganut paradigma kesejahteraan adalah menolong mengurangi penderitaan mereka melalui kegiatan berbentuk derma, sedekah, atau santunan. LSM kelompok ini cenderung toleran, bahkan mempertahankan status quo dan selalu berusaha membantu pemerintah, menghindari konflik dan pandangan politik konservatif. Contoh LSM yang menganut paradigma ini adalah Dian Desa dan Yayasan Ilmu Sosial.

Kelompok kedua, yaitu LSM penganut paradigma modernisasi. LSM ini memandang bahwa keterbelakangan, termasuk kemiskinan, disebabkan oleh rendahnya pendidikan, penghasilan, keterampilan, dan juga kesehatan, khususnya gizi. Karena itu segala kegiatannya ditunjukkan untuk memperbanyak prasarana (dengan membangun sekolah atau klinik-klinik kesehatan), atau meningkatkan pendapatan (dengan menyediakan modal).

⁵ Herdi SRS, LSM: Demokrasi dan Keadilan Sosial: Catatan Kecil dari Arena Masyarakat dan Negara (Jakarta: LP3ES dan Yappika; 1999) Hal. 131-145.

LSM jenis ini biasanya punya tertib administratif, formal, dan cenderung birokratis, namun mengarah ke modernisasi. Pandangan politiknya cenderung konservatif, menghindari konflik, melakukan perubahan secara fungsional, dan mendukung pemerintah. Contoh LSM jenis ini adalah PKBI, Lakpesdam (NU), Bina Swadaya, dan LP3M.

Kelompok ketiga adalah yang paradigma reformasi. LSM kelompok ini berkeyakinan bahwa sumber dari masalah-masalah sosial adalah lemahnya pendidikan, korupsi, mismanajemen, dan inefisiensi. Karena itu mereka memilih aktifitas-aktifitas berupa memperbanyak tenaga profesional, perbaikan peraturan dan perundang-undangan, pemberlakuan sanksi yang berat terhadap pelanggar hukum. Semua itu dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki manajemen pelayanan umum, dan meningkatkan disiplin hukum. Pandangan LSM kelompok ini terhadap perubahan sosial masih menganut pendekatan fungsional dan cenderung menghindari konflik. Pandangan politiknya yang liberal mengarah ke reformasi yang bertujuan menata kembali dan merampingkan pemerintahan. Contoh LSM dalam kelompok ini adalah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Kalyanamitra, dan Prakarsa.

Jenis LSM keempat adalah kelompok yang berparadigma liberasi atau pembebasan. LSM kategori ini berpandangan bahwa penyebab segala keterbelakangan, termasuk kemiskinan, adalah penindasan, penghisapan atau eksploitasi, dan pembodohan rakyat. Karena itu mereka menentang semua bentuk “penindasan”. Bentuk kegiatan yang dilakukan biasanya berupa pendidikan politik populer, pencetakan kader gerakan, mobilisasi aksi, ataupun kampanye pembentukan opini publik. Gaya kerjanya biasanya populis, militan, kerja tim, dan

berdisiplin ketat. LSM kategori ini lebih menginginkan perubahan yang bersifat struktural dan menghargai serta mengelola konflik. Pandangan politiknya radikal, liberal, menuntut otonomi mutlak untuk rakyat, ingin mengurangi atau menghapuskan struktur pemerintahan atau negara (*ala Gramsci*), atau paling tidak mengganti pemerintah. LSM kategori ini diilhami oleh paham kemerdekaan, hak asasi manusia, dan teologi pembatasan. Contoh LSM dalam kategori ini adalah LP3ES dan P3M.

Kelima adalah LSM pemeluk paradigma transformasi. LSM kelompok ini menganggap bahwa sumber keterbelakangan dan kemiskinan adalah ketidakadilan tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Karena itu mereka sangat berkeinginan menciptakan tatanan baru yang lebih adil. Kegiatan-kegiatannya biasanya dilakukan melalui penyadaran politik, pengorganisasian rakyat, mobilisasi aksi, dan membangun jaringan advokasi. Struktur organisasi dan gaya kerjanya biasanya mirip dengan LSM penganut paradigma liberasi, yaitu populis, militan, kerja tim, dan berdisiplin tinggi. LSM jenis ini dalam pandangannya mengenai perubahan sosial juga menginginkan perubahan struktural, dan tidak segan-segan berkonflik. Pandangan politiknya radikal dan sama dengan kelompok liberasi. LSM jenis ini sangat yakin bahwa rakyat punya kemampuan untuk melakukan perubahan. Contoh LSM kelompok ini adalah YLBHI dan Infight. LSM-LSM tersebut termasuk dalam kelompok ini, tetapi juga masih mempunyai sifat LSM pembebasan. Dewasa ini terdapat kira-kira 4000-7000 LSM di Indonesia belum termasuk yang timbul tenggelam dan terbentuk secara mendadak karena ada proyek.⁶

⁶ Ivan A. Hadar, "Parpol LSM", *Republika*, 6 Januari 2006. Dalam buku Prof. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 392

Salah satu upaya masyarakat untuk mewujudkan kebaikan bersama antara lain adalah dengan dibentuknya lembaga swadaya masyarakat. Pengertian lembaga swadaya masyarakat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8 Tahun 1990 tentang pembinaan lembaga swadaya masyarakat. Dinyatakan bahwa lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah organisasi yang beranggotakan warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau sukarela bermaksud atau bergerak dalam bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga tersebut sebagai bentuk keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kinerja masyarakat, standar hidup dan kesejahteraan. sebuah masyarakat yang berfokus pada swasembada dalam pelayanan masyarakat. Sebagian masyarakat umum yang belum mengetahui peran dan fungsi LSM dalam berkehidupan di masyarakat, karena stigma masyarakat terhadap LSM GMBI saat yang seringkali dikabarkan dengan isu miring mengenai perilaku yang meresahkan di masyarakat.⁷

Beragam kelompok dengan beragam kepentingan biasanya bekerja sama. Masing-masing kelompok bekerja sama dengan kelompok lain yang kira-kira sama orientasinya. Jaringan kerjanya sangat luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri berkat proses globalisasi. Demonstrasi-demonstrasi terhadap World Trade Organization di Seattle (1999) dan di Hongkong (2005) membuktikan betapa kuatnya organisasi-organisasi internasional ini dalam mengerahkan massa, baik di negara masing-masing maupun lintas negara. Lagi pula media massa juga banyak membantu dengan menyebarkan pesan mereka melalui liputan yang luas. Dengan demikian New Social Movements (NSM), terutama yang besar, menjadi

⁷ Yusdianto, "Konstruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undang-undang Keormasan", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, Agustus 2012, Hal. 3

faktor partisipasi politik yang penting dalam masyarakat demokrasi dari bawah (*democracy from below*). Mereka bertindak sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, terutama di tingkat akar rumput (*grass roots*) dengan memberikan masukan kepada para pembuat keputusan. Selain itu, mereka dapat menjadikan badan eksekutif dan anggota parlemen lebih responsif dan akuntabel terhadap masyarakat. Dalam rangka ini mereka dianggap sebagai faktor yang sangat penting dalam proses demokrasi.

Sekalipun demikian, ada kalangan masyarakat yang menyatakan keprihatinannya bahwa tindakan langsung (*direct action*) yang kadang-kadang menjurus ke radikalisme ini dapat menjadi faktor perusak bagi suatu sistem politik yang masih kurang stabil sehingga negara yang bersangkutan menjadi “negara tak berdaya” atau “negara lemah” (*weak state*).

Sesudah mempelajari berbagai analisis mengenai NSM, Enrique Larana, Hank Jhonston, dan Joseph R. Gusfield (1994) sampai pada suatu kesimpulan yang diutarakan secara singkat dibawah ini.

1. Basis NSM bersifat lintas kelas sosial. Latar belakang status sosial peserta yang tersebar (*diffuse social statuses*) seperti golongan muda, gender, dan mereka yang mempunyai perbedaan orientasi seksualitas (*gay atau lesbian*).
2. Karakteristik sosial mereka sangat berbeda dari ciri gerakan buruh, maupun dengan konsepsi Marxis bahwa ideologi merupakan unsur yang mempersatukan. Mereka menganut pluralisme dalam ide dan nilai, berorientasi pragmatis dan memperjuangkan partisipasi dalam proses membuat keputusan. Pernah disebut sebagai dinamika demokratisasi (*democratization dynamic*).
3. Dalam kehidupan sehari-hari, NSM menumbuhkan dimensi identitas,

baik NSM yang baru maupun yang sebelumnya lemah; sifatnya lebih memerhatikan masalah identitas daripada masalah bidang ekonomi. NSM mendasarkan diri atas suatu perangkat kepercayaan dan nilai yang menyangkut keyakinannya, bahwa ia termasuk suatu kelompok sosial yang berbeda (*differentiated social group*); menyangkut citra mengenai diri sendiri; dan menyangkut terbentuknya lambang-lambang baru mengenai kehidupan sehari-hari. Hal ini khusus berlaku untuk gerakan etnis, separatis, dan nasionalis dalam suatu negara. Contoh: gerakan Basque di Spanyol, gerakan-gerakan etnis di negara bekas (*Union of Soviet Socialist Republics*) USSR. Termasuk juga gerakan perempuan dan gerakan hak kaum gay.

4. Hubungan antara individu dan kolektivitas kabur. Gerakan-gerakan ini lebih sering dilaksanakan dengan kegiatan individual dibanding melalui kelompok termobilisasi. Contoh: gerakan hippie merupakan contoh dimana unsur individual lebih dominan, sedangkan gerakan hak kaum gay dan gerakan perempuan memperlihatkan campuran dari tindakan kolektif dan individual. Suatu contoh dimana unsur kolektif lebih menonjol ialah gerakan mahasiswa dan berbagai counter cultures di tahun 1960-an.

5. NSM sering menyangkut hal-hal yang sifatnya pribadi seperti aborsi, anti merokok, dan pengobatan alternatif. Pemikiran ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

6. Taktik mobilisasi yang dipakai oleh NSM ialah melalui anti kekerasan dan ketidakpatuhan (*civil disobedience*), hal yang jauh berbeda dengan taktik-taktik yang dipakai gerakan-gerakan buruh tradisional.

7. Berkembangnya kelompok-kelompok NSM dipicu antara lain oleh timbulnya krisis kepercayaan terhadap sarana-sarana partisipasi politik, terutama

perilaku partai massa tradisional.

8. Berbeda dengan birokrasi dari partai-partai tradisional, kelompok-kelompok NSM cenderung tersegmentasi, tersebar luas tanpa fokus, dan tidak sentralistis.⁸

Menurut IDEA (2000), sekalipun banyak LSM berjasa di bidang masing-masing, tetapi ada sejumlah persoalan para LSM sendiri yang harus diselesaikan. Beberapa persoalan yang dihadapi di antaranya adalah memperbaiki dukungandan akuntabilitas keuangan, meningkatkan kecakapan manajemen dan organisasi, memperluas cakupan geografis operasinya. Padahal, harus diakui bahwa LSM, maupun sesama pejuang di luar negeri, berperan penting dalam memajukan demokrasi. Mungkin dampaknya akan lebih besar jika LSM juga memperbaiki kinerja internalnya.⁹

Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dideklarasikan tahun 2002 oleh pengusaha bisnis pengolahan limbah pabrik bernama CV. Radel Khalishan Alamindo dan juga mantan Calon Legislatif Dapil IX DPRD Jawa Barat dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yaitu Bapak Moh Fauzan Rachman, SE. LSM GMBI di deklarasikan pada 18 maret 2002 dan berkantor di Jl. Muara Raya No.10, Pelindung Hewan, Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Alasan didirikannya Gerakan Masyarakat Indonesia Bawah (GMBI) adalah karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuatan politik, keuangan dan jaringan, sehingga mudah dirugikan dan tertindas.¹⁰

⁸ Enrique Larana, Hank Johnston, and Joseph R. Gustfeld, *New Social Movements: From Ideology to Identity* (Philadelphia: Temple University Press, 1994), hlm. 6-9. Dalam buku Prof. Miriam Budiarjo, hlm. 386

⁹ Forum untuk Reformasi Demokrasi, *Penilaian Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Internasional IDEA, 2000), Hal. 113-117.

¹⁰ Diakses pada tanggal 25 maret 2022 Laman web: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/03/150000579/sejarah-gerakan->

Kasus pengusuran PKL di Stasiun Kota Bekasi dimulai sejak februari 2009 dan LSM GMBI yang tergabung dengan para pedagang menolak pengusuran karena para pedagang merasa sudah membayar uang sewa lahan kepada petugas stasiun kereta api. Pihak PT. KAI (Persero) membantah dan tidak merasa menerima bayaran dari para pedagang kaki lima walau sempat terjadi saling dorong antara petugas dengan pedagang, pengusuran tetap dilakukan. Padahal kepala Stasiun Kota Bekasi, Rudi krisno mengatakan rencana penertiban kawasan peron stasiun sudah diberitahukan kepada para pedagang kaki lima dan sudah menawarkan lokasi baru yang berada di pelataran utara stasiun, tetapi para pedagang tetap menolak tawaran lokasi tersebut.¹¹

Upaya LSM GMBI yang pertama adalah menunda penertiban terhadap PKL di stasiun kota Bekasi dengan alasan latar belakang pedagang yang sudah tidak bekerja atau pensiunan karyawan, kondisi sosial ekonomi, dan tidak ada fasilitas yang layak untuk berdagang. Kedua karena PKL tersebut sebagian ada yang anggota binaan LSM GMBI dan upaya lainnya LSM GMBI mengharapkan adanya musyawarah antara pihak PKL, LSM GMBI, yang difasilitasi dengan pemerintah daerah kota Bekasi camat atau lurah sebagai mediator, lalu yang menjadi fokus GMBI adalah mencari solusi ke pemerintah daerah untuk memfasilitasi PKL yang terkena pengusuran, ke tempat yang lebih layak untuk berdagang. Maka LSM GMBI membuat fakta integritas agar tidak dianggap sebagai pungli dengan tanda tangan diatas materai oleh pihak PKL yang meminta bantuan kepada LSM GMBI bahwa PKL tersebut binaan dari LSM GMBI. Jika PKL sudah membuat kesepakatan dengan meminta bantuan kepada LSM GMBI berdasarkan surat kuasa

masyarakat-bawah- indonesia- gmbi-

¹¹ Diakses pada tanggal 25 maret 2022 web: <https://www.liputan6.com/news/read/172992/ratusan-pkl-di-stasiun-bekasi-diusir>

pendampingan, lalu GMBI berusaha mendampingi dan mengamankan area tersebut. Massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) pada November 2013 menolak kembali pengusuran yang masih terus dilakukan oleh PT. KAI (Persero) dari tahun 2009, ada sekitar seratus massa GMBI yang berunjuk rasa di stasiun Kota Bekasi, GMBI menuntut pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mencabut surat edaran nomor 183/BKS/XI/2013 tentang pelarangan PKL berjualan di dalam stasiun Kota Bekasi. Surat edaran tersebut memberitahukan bahwa para pedagang kaki lima diberi batas waktu sampai dengan tanggal 30 November 2013 dan segera mengosongkan area berdagang di stasiun Kota Bekasi, jika pedagang tidak mentaati intruksi tersebut maka PT. Kereta Api Indonesia (Persero) akan melakukan penertiban. Ketua LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Zakaria mengatakan bahwa pedagang kaki lima berdagang di ring 3 yang keberadaannya tidak mengganggu kenyamanan para pengguna kereta api.¹² Hasil pemaparan yang ada di dalam latar belakang masalah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **Peran LSM Sebagai Kelompok Penekan Terhadap Pengusuran PKL Di Stasiun Kota Bekasi Tahun 2013 (Studi Kasus LSM GMBI Distrik Kota Bekasi)**. Karena LSM GMBI lahir di Kota Bekasi diawali dari membela kaum Pedagang Kaki Lima di Stasiun Kota Bekasi.

¹² Diakses pada tanggal 25 maret 2022 Laman web: <https://www.beritasatu.com/megapolitan/152750/massa-gmbi-tolak-pelarangan-pkl-di-stasiun-bekasi>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan tentang peran LSM GMBI sebagai kelompok penekan dapat mempengaruhi kebijakan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia Persero sejak februari 2009 kepada para pedagang kaki lima yang akan ditertibkan di dalam area peron 1 dan 2 di Stasiun Kota Bekasi, jika tidak ada pendampingandan massa yang berunjuk rasa dari LSM GMBI yang tergabung dengan para pedagang kaki lima, maka akan terjadi keputusan sepihak yang dilakukan oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia Persero, dengan adanya massa yang melakukan penolakan pengusuran PKL di stasiun Kota Bekasi. Para pedagang kaki lima dapat menemukan titik terang, bahwapihak PT. KAI (Persero) harus memberikan solusi kepada pedagang kaki lima yang kehilangan mata pencahariannya yang didapatkan dengan berjualan setiap harinya.

Pengusuran PKL terjadi bukan hanya di Stasiun Kota Bekasi akan tetapi terhadap keseluruhan PKL di stasiun-stasiun Jabodetabek. Dalam banyak kasus pengusuran pedagang kaki lima stasiun, PT. KAI menutup obrolan dengan para pedagang. Upaya para pedagang kaki lima untuk berdialog tidak berhasil. Bahkan, sebagian besar pedagang resmi menyetorkan dana ke PT untuk berdagang distasiun tersebut. Mungkin. Jumlahnya mencapai puluhan juta. Beberapa bahkan menelan biaya Rp. 30-50 juta. Bayangkan jika jumlah pemilik kios di seluruh stasiun di Jabodetabek mencapai ribuan, berarti PT KAI akan menerima puluhan miliar dari para pedagang tersebut. Selain itu, pengusuran PKL tidak dapatdibenarkan dengan dalih apa pun di bawah Konstitusi. Kecuali negara dapatmemenuhi kewajiban konstitusionalnya dengan menyediakan pekerjaan yang layak dan layak bagi

seluruh rakyat. Meski alasannya terletak pada tata letak peron dan tempat parkir, PT. KAI tidak harus menjual merchant. PT. KAI dapat menggunakan dana yang disetorkan oleh merchant untuk menyelenggarakan:

Membangun area perbelanjaan yang bersih dan nyaman. Selain itu, PT. KAI harus fokus pada peningkatan pelayanan kereta api, penambahan jumlah kereta api dan pengaturan jadwal. Hingga saat ini, PT. KAI masih sangat buruk. Benar, dengan proses privatisasi, harga KA terus naik. PKL sendiri tidak boleh dianggap remeh. Menurut Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), ada sekitar 25 juta unit pedagang kaki lima di Indonesia. Seluruh Lapak mempekerjakan sedikitnya 90 juta pekerja. PKL sudah menempati 80% toko ritel di Indonesia. Jadi pemerintah harus berterima kasih kepada pedagang kaki lima. PT. KAI harus belajar dari BUMN Venezuela. Di Venezuela, BUMN tidak hanya memiliki tugas melengkapi kas negara, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Misalnya, perusahaan minyak negara Venezuela (PDVSA) terlibat dalam pengorganisasian kebutuhan dasar rakyat. PDVSA juga terlibat dalam pembiayaan berbagai program sosial pemerintah seperti perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan program kredit mikro untuk perekonomian nasional. Sebagian besar BUMN kita, termasuk PT. Memang, KAI di ambang privatisasi. Dengan privatisasi tersebut, PT. KAI hanya untuk penggunaan komersial. Fungsi sosialnya ditinggalkan. Akibatnya, PT.KAI tidak peka terhadap kehidupan manusia. Dalam banyak kasus, pengusuran pedagang kaki lima di stasiun kereta api berfungsi untuk membuka ruang bagi kehadiran komersial besar (mini market) dan restoran cepat saji. Inilah yang Anda lihat dalam kenyataan pedagang kaki lima diusir, tapi mini market tetap ada. Pengusuran adalah salah satu bentuk penyitaan. Yang direnggut adalah pekerjaan dan kesempatan untuk bertahan hidup. Pengusuran tersebut tidak hanya

inkonstitusional, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Penggusuran menyebabkan banyak orang, terutama para korban dan keluarganya, kehilangan kemampuan finansial untuk melanjutkan hidup.¹³

Dalam perumusan masalah di atas menimbulkan beberapa pertanyaan yang perlu dicermati :

1. Mengapa LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia menolak kasus penggusuran yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia terhadap Pedagang Kaki Lima di Stasiun Kota Bekasi Tahun 2013?
2. Bagaimana peran LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia sebagai kelompok penekan dalam kasus penggusuran terhadap Pedagang Kaki Lima di Stasiun Kota Bekasi Tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis seperti yang diuraikan pada latar belakang yang sudah penulis jelaskan. Jika stigma masyarakat yang menganggap LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia berperilaku anarkisme, premanisme dan meresahkan.

1. Untuk mengetahui latar belakang LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang menolak kasus penggusuran Pedagang Kaki Lima di Stasiun Kota Bekasi yang dilakukan PT KAI (Persero).
2. Untuk mengetahui peran LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia sebagai kelompok penekan dalam kasus penggusuran terhadap Pedagang Kaki Lima di Stasiun Kota Bekasi.

¹³ <https://www.berdikarionline.com/pt-kai-dan-penggusuran-pkl/>

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Bagi Akademis

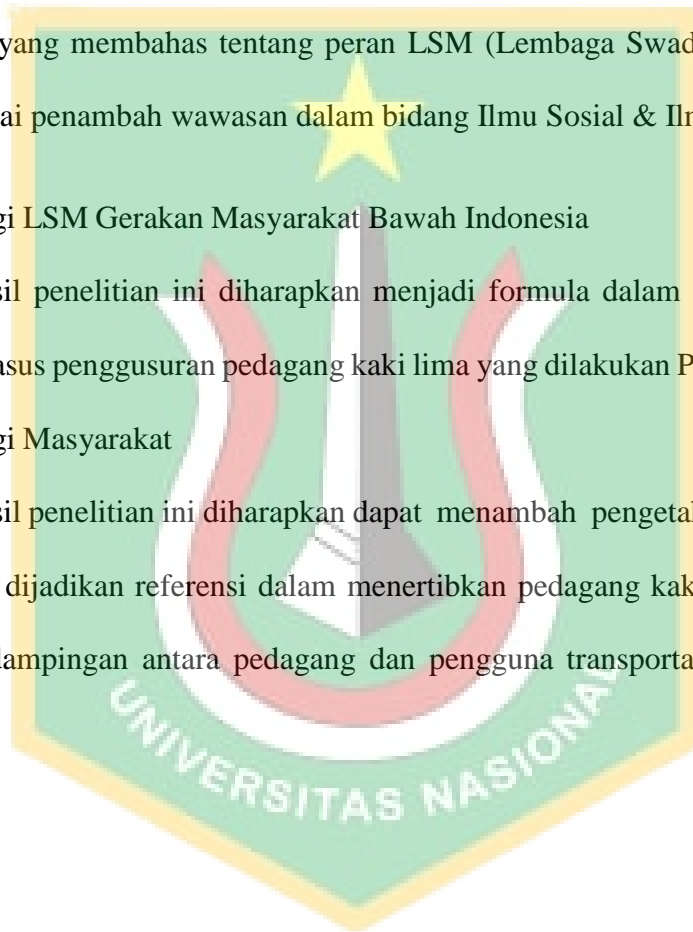
Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian yang akan datang terkait dalam bidang studi Ilmu Sosial & Ilmu Politik khususnya penelitian yang membahas tentang peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), serta sebagai penambah wawasan dalam bidang Ilmu Sosial & Ilmu Politik.

2. Bagi LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi formula dalam mengambil peran terhadap kasus pengusuran pedagang kaki lima yang dilakukan PT. KAI (Persero).

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembacaan dapat pula dijadikan referensi dalam menertibkan pedagang kaki lima agar dapat hidup berdampingan antara pedagang dan pengguna transportasi atau pengguna jalan.



1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN latar belakang pemilihan topik penelitian ini mengenai peran LSM sebagai kelompok penekan terhadap pengusuran pedagang kaki lima di Stasiun Kota Bekasi. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengusir beralasan agar menciptakan kenyamanan, kebersihan dan keamanan para penumpang di area Stasiun. Para pedagang kaki lima mengaku telah tepat waktu membayar iuran setiap bulannya kepada petugas Kereta Api Indonesia. Tetapi dari pihak PT. Kereta Api Indonesia mengatakan Stasiun Bekasi termasuk stasiun yang 'bandel'. PT. KAI telah lama mengeluarkan kebijakan melarang PKL berjualan di area stasiun, dan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh banyak stasiun. Namun, Stasiun Bekasi satu diantara sedikit stasiun di kawasan Jawa Barat yang cuek terhadap kebijakan PT. KAI.

BAB II: Kajian Pustaka menguraikan teori terdahulu yang akan digunakan untuk penelitian dengan konsep yang dianggap relevan dan untuk membedakan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dan apa yang akan dilakukan peneliti. Penelitian ini menganalisis tentang peran LSM sebagai kelompok penekan terhadap pengusuran PKL di Stasiun Kota Bekasi tahun 2013. Konsep teori yang digunakan yaitu Teori Kelompok penekan, Teori Peran, Teori Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Teori Konflik.

BAB III: Metodologi Penelitian menguraikan secara singkat penggunaan metodologi penelitian, dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, jenis teknik pengumpulan data (wawancara dan studi pustaka), teknik pemeriksaan

keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, dan analisis data.

BAB IV: Gambaran Umum akan menguraikan penjelasan mengenai gambaran, peran LSM sebagai kelompok penekan terhadap penggusuran PKL di Stasiun Kota Bekasi Tahun 2013 (Studi Kasus : LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Distrik Kota Bekasi), gambaran tempat penelitian, dan hasil dari penelitian yang ada dilapangan. Selain itu menguraikan analisis dari rumusan masalah penelitian.

BAB V: Hasil Penelitian dan Pembahasan akan menguraikan analisis dari 3 hal yaitu LSM GMBI Distrik Kota Bekasi sebagai Kelompok Penekan terhadap PT. KAI, Peran dan Fungsi LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia dalam melakukan rencana strategis dan konflik yang terjadi dilapangan dengan pihak PT. KAI dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia mengadvokasi dan sebagai mediator pedagang kaki lima.

BAB VI : Penutup akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

